



EDISI SELASA 08 JULI 2026

H A R I A N

LENTERA

Inspirasi Perubahan

TODAY

02
05
10GOVERNMENTTODAY
PM Modi Bagi Resep Sukses Makan Siang Sekolah India ke PrabowoNUSANTARA
Kasus Penipuan Haji dan Umrah 2026
32 Orang Resmi Tersangka, 3.550 Jemaah Jadi KorbanLISTSTYLE
Ingin Wajah Tampak Lebih Tirus? Coba Tips Memakai Hijab Ini

Kala Jalan Cinta Ambles

Pengendara sepeda motor melintasi Jalan Cinta yang retak dan ambles di kawasan Pulogadung, Jakarta, Selasa (7/7/2026). Warga menyebut kerusakan yang telah berlangsung sekitar lima bulan itu diduga dipicu pengerukan Kali Sunter di sisi jalan, sehingga akses kini hanya dapat dilalui kendaraan roda dua. Sudin SDA memasang dolken sebagai penanganan sementara, sementara Pemprov DKI Jakarta memastikan perbaikan jalan akan segera dilakukan. (ant.ist)

Makin Gelap Pendidikan Dokter Spesialis LAGI-LAGI NYAWA MELAYANG **DIPICU PERUNDUNGAN**

Lagi-lagi nyawa tenaga medis muda melayang. Kematian dr. Adrian Rantung, peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesiologi Universitas Sam Ratulangi yang ditemukan wafat di kosnya pada 5 Juli 2026, menjadi alarm keras rapuhnya proteksi terhadap tenaga medis. Investigasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menduga kuat adanya tekanan mental akibat perundungan senioritas. Hal inipun berujung pada pembekuan aktivitas klinis Anestesiologi di RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado. Tragedi tersebut memperpanjang rentetan tekanan psikis yang menimpa nakes sepanjang paruh pertama 2026. Sebelumnya, dr. Elisa Princilia di NTT wafat pada 26 Juni 2026, diduga pasca-trauma akibat intimidasi verbal oknum DPRD. Ada juga kasus eksploitasi jam kerja ekstrem yang merenggut nyawa dr. Myta pada Mei 2026 hingga memicu perombakan total aturan batas kerja internship oleh Menteri Kesehatan. Rentetan insiden ini menegaskan jika lingkungan kerja dan pendidikan kedokteran masih dilingkari praktik lancung sistemik. Data Kemenkes dan penegakan hukum awal tahun ini mencatat Rektorat Unsri menjatuhkan SP2 atas pemerasan iuran residensi kepada junior pada Januari 2026, disusul putusan inkrah Mahkamah Agung pada Februari 2026 yang menghukum eks Kaprodi PPDS Undip terkait pungli operasional tak resmi. Selanjutnya soal kematian tiga dokter magang di Cianjur, Rembang, dan Denpasar pada Maret 2026. Meski Kemenkes menyatakan murni karena sakit, fakta sanksi pidana pemerasan hingga pembekuan kluster pendidikan menjadi bukti konkret bahwa BACA HAL 11...

SENIORITAS**Kematian
Terkait
Tekanan
Psikis**

dr. Adrian
Rantung (Juli 2026)

Mahasiswa PPDS Unsrat ditemukan meninggal di kos, diduga akibat tekanan mental karena perundungan. Kemenkes menghentikan sementara Prodi Anestesiologi RSUP Kandou.



dr. Elisa Princilia
Utami Paksaenoni /
dr. Icha (Juni 2026)

Dokter umum meninggal setelah mengalami trauma psikologis, diduga dipicu intimidasi verbal dari tiga oknum anggota DPRD.

**Kematian
Terkait
Faktor
Kesehatan**

dr. Myta
(Mei 2026)

Dokter internship meninggal karena faktor kesehatan. Kasus ini mendorong evaluasi aturan jam kerja dokter magang.



Tiga Dokter
Internship
(Maret 2026):

Meninggal di Cianjur, Rembang, dan Denpasar. Hasil investigasi Kemenkes menyatakan penyebabnya sakit, bukan overwork atau perundungan.



PM MODI BAGI RESEP

SUKSES MAKAN SIANG SEKOLAH INDIA KE PRABOWO

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri (PM) India, Narendra Modi, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (7/7/2026). Kunjungan diplomasi tingkat tinggi ini menghasilkan komitmen besar. Salah satunya India secara resmi membagikan pengalaman sukses serta formula pengelolaan makan siang sekolah kepada Indonesia guna mendukung akselerasi program unggulan nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG).

India merupakan pionir global dalam urusan ini melalui kebijakan Mid-Day Meal Scheme. Skema tersebut saat ini memegang rekor sebagai program pemberian makan gratis di sekolah dengan skala terbesar di dunia. Kemiripan fundamental antara kebijakan Mid-Day Meal milik India dan visi MBG yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo menjadi pemantik utama perluasan kerja sama bilateral ini ke tingkat yang lebih strategis.

Dalam konferensi pers bersama usai mengadakan pertemuan bilateral, PM Narendra Modi menegaskan bahwa New Delhi dan Jakarta memiliki kesamaan visi dan prioritas pembangunan, terutama yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat akar rumput dan pengentasan kemiskinan yang terstruktur.

"Kami telah berbagi solusi dengan Indonesia mengenai 'Skema Makan Siang Sekolah' (Mid-day Meal) dan 'Sistem Distribusi Publik' kami. Sekarang kami membawa kerja sama ini ke tingkat berikutnya," ujar PM



Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2026). (rtr)

Modi di hadapan awak media di Istana Merdeka.

Modi menambahkan, menyalurkan manfaat langsung dari program kesejahteraan negara ke tangan warga negara yang membutuhkan adalah esensi utama dari kepemimpinannya dan Presiden Prabowo. Berbagi praktik terbaik (best practices) dalam mengelola logistik massal, kandungan nutrisi, hingga efisiensi anggaran Mid-Day Meal diharapkan dapat membantu

Indonesia memantapkan implementasi MBG secara masif di berbagai daerah.

Selain membahas ketahanan sosial melalui pangan sekolah, kedua pemimpin negara juga menandatangani sejumlah kesepakatan krusial di sektor pemulihan kesehatan publik. Melalui nota kesepahaman yang disepakati, Indonesia akan membuka akses lebih luas bagi masuknya produk farmasi

16 KERJA SAMA STRATEGIS
INDONESIA-INDIA YANG DISEPAKATI
PRABOWO DAN MODI (7 JULI 2026)

1. Pengadaan sistem rudal BrahMos antara BrahMos dan Kementerian Pertahanan RI.
2. Kerja sama rudal udara ke udara antara Bharat Dynamics dan Republikorp.
3. Perpanjangan kerja sama eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa untuk tujuan damai antara BRIN dan ISRO.
4. Perpanjangan protokol kerja sama keselamatan dan keamanan maritim.
5. Nota Kesepahaman penanggulangan bencana.
6. Kerja sama pengembangan mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja.
7. Pembentukan usaha patungan (joint venture) antara Steel Authority of India (SAIL) dan PT Krakatau Steel.
8. Kerja sama antara NFTDC, Midwest Ltds., dan PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) di bidang teknologi material non-ferrous dan mineral.
9. Implementasi kerja sama pengembangan tenaga kesehatan.
10. Nota Kesepahaman regulasi produk medis.
11. Kerja sama teknologi dan layanan telekomunikasi.
12. Kerja sama riset, teknologi, dan inovasi.
13. Kerja sama pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemilu.
14. Nota Kesepahaman kerja sama sektor pertanian (agrikultur).
15. Letter of Intent untuk konservasi dan restorasi Kompleks Candi Prambanan.
16. Nota Kesepahaman pengembangan sumber daya manusia antara Indian Institute of Management Bangalore dan PT Intelegrasi Grahata.

Perbaiki Tata Kelola,
Pimpinan Baru BGN Sambangi KPK

Siswa menyantap makanan saat istirahat makan siang di sebuah sekolah menengah negeri di pinggiran Hyderabad, India, pada 23 November 2021.



IAJARAN pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, pada Selasa (7/7/2026). Audiensi ini dilakukan untuk membahas langkah konkret tindak lanjut atas hasil kajian Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK terkait mitigasi risiko korupsi

dalam tata kelola program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah ini sekaligus mengungkap fakta baru bahwa rekomendasi krusial yang diserahkan KPK sejak 17 Maret 2026 lalu, ternyata sempat diabaikan dan tidak mendapat tanggapan pada masa kepemimpinan Kepala BGN sebelumnya, Dadan Hindayana. Rekomendasi tersebut baru diurai setelah Dadan bersama dua wakilnya ditetapkan sebagai terduga oleh Kejaksaan Agung RI atas kasus dugaan korupsi tata kelola MBG.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa saat manajemen baru masuk pada awal Juni 2026, mereka menemukan dokumen hasil kajian KPK mengenai mitigasi korupsi MBG belum

ditindaklanjuti sama sekali oleh pejabat lama.

"KPK sudah memberikan hasil kajian pada 17 Maret 2026. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan," ungkap Agustina kepada wartawan di Gedung KPK.

Menyikapi hal tersebut, manajemen baru di bawah Kepala BGN Nanik S. Deyang langsung membentuk tim internal untuk membedah seluruh temuan secara menyeluruh guna menyusun rencana aksi penanganan (action plan). Dalam audiensi yang berlangsung hangat tersebut, pimpinan KPK memberikan wejangan tegas agar BGN memfokuskan program MBG agar lebih tepat sasaran. KPK meminta agar basis data penerima manfaat diperketat agar tidak meluas tanpa indikator yang terukur. (tin,ist/dya)

asal India yang dikenal berkualitas tinggi namun memiliki harga yang sangat terjangkau.

Langkah ini diproyeksikan dapat menekan biaya pengobatan nasional dan memperkuat jaminan kesehatan masyarakat. Tidak hanya berhenti pada komoditas obat, India juga berkomitmen mendukung penguatan sumber daya manusia (SDM) medis di dalam negeri.

"Melalui kesepakatan hari ini, obat-obatan India yang berkualitas tinggi dan terjangkau akan tersedia dengan lebih mudah bagi warga Indonesia. Kami juga akan berkontribusi dalam pembangunan kapasitas dokter dan tenaga kesehatan Indonesia," kata PM Modi menjelaskan.

Di sektor agraris, pertemuan bilateral ini mengunci komitmen India untuk menyokong stabilitas ketersediaan pangan di Indonesia. New Delhi memastikan dukungan pasokan benih gandum unggulan yang dikembangkan oleh pusat riset mereka untuk diuji coba dan diintegrasikan dalam ekosistem pertanian lokal guna memperkuat diversifikasi pangan nasional. (tin,rls,ant/dya)

BANYAK PROYEKSI NEGATIF DARI PURBAYA, DPR WANTI-WANTI

Pemerintah memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akan melebar signifikan hingga akhir tahun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa defisit diperkirakan membengkak menjadi Rp734,3 triliun atau setara dengan 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). DPR mewanti-wanti pemerintah, sebab bisa diduga melanggar target defisit yang diatur Undang-Undang (UU) APBN 2026, yakni sebesar Rp689,1 triliun, atau setara 2,68 persen terhadap PDB.

Proyeksi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebenarnya lebih tinggi dari target awal yang ditetapkan sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen dari PDB.

REALISASI SEMESTER I & OUTLOOK APBN 2026

Pendapatan Negara

I. Penerimaan Perpajakan

- Target APBN 2026: Rp 3.153,60 triliun
- Realisasi Semester I-2026: Rp 1.459,40 triliun
- Outlook 2026: Rp 3.208,10 triliun

II. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

- Target APBN 2026: Rp 459,20 triliun
- Realisasi Semester I-2026: Rp 271,00 triliun
- Outlook 2026: Rp 575,10 triliun

III. Penerimaan Hibah

- Target APBN 2026: Rp 0,70 triliun
- Realisasi Semester I-2026: Rp 0,70 triliun
- Outlook 2026: Rp 1,50 triliun

Belanja Negara

I. Belanja Pemerintah Pusat

- Target APBN 2026: Rp 3.149,70 triliun
- Realisasi Semester I-2026: Rp 1.298,60 triliun
- Outlook 2026: Rp 3.245,50 triliun

II. Transfer ke Daerah

- Target APBN 2026: Rp 693,00 triliun
- Realisasi Semester I-2026: Rp 357,40 triliun
- Outlook 2026: Rp 696,90 triliun

Keseimbangan Primer

Surplus / Defisit

- Target APBN 2026: Rp -689,10 triliun
- Realisasi Semester I-2026: Rp -196,50 triliun
- Outlook 2026: Rp -734,30 triliun

% PDB

- Target APBN 2026: -2,68%
- Realisasi Semester I-2026: -0,76%
- Outlook 2026: -2,85%

Pembiayaan Anggaran

- Target APBN 2026: Rp 689,10 triliun
- Realisasi Semester I-2026: Rp 452,00 triliun
- Outlook 2026: Rp 734,30 triliun



"Outlook defisit APBN tercatat sebesar Rp734,3 triliun dengan persentase sebesar 2,85 persen terhadap PDB," ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (7/7/2026).

Pelebaran defisit tersebut dipicu oleh realisasi belanja negara yang diperkirakan melampaui pagu, sementara penerimaan pajak justru

melosot jauh dari target awal yang disepakati.

Total belanja negara hingga akhir tahun diproyeksikan mencapai Rp3.942,4 triliun, atau sebesar 102,6 persen dari target awal Rp3.842,7 triliun.

Kenaikan realisasi paling signifikan terjadi pada belanja pemerintah pusat, khususnya belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang

diperkirakan mencapai Rp1.630,4 triliun atau 107,9 persen dari pagu awal Rp1.510,5 triliun.

Sebaliknya, anggaran transfer ke daerah diperkirakan bergerak stabil di angka Rp696,9 triliun atau 100,6 persen dari pagu.

Kondisi fiskal semakin tertekan karena sektor penerimaan perpajakan dipastikan mengalami shortfall atau kekurangan target sebesar Rp46,9 triliun. Realisasi penerimaan pajak hingga akhir tahun diperkirakan hanya mencapai Rp2.310,8 triliun, atau hanya memenuhi 98 persen dari target awal sebesar Rp2.357,7 triliun.

Purbaya menjelaskan bahwa meskipun realisasi tersebut menjauh dari target APBN, secara nominal penerimaan ini masih mencatatkan pertumbuhan dibandingkan periode sebelumnya. "(Outlook) pajak Rp2.310,8 triliun, tumbuh 20,5 persen," kata Purbaya.

Secara kumulatif, total penerimaan perpajakan yang mencakup pajak serta kepabeanan dan cukai diproyeksikan hanya mencapai Rp2.631,4 triliun atau 97,7 persen dari pagu Rp2.693,7 triliun. Sektor kepabeanan dan cukai juga dilaporkan menurun dengan perkiraan realisasi sebesar Rp320,6 triliun dari target Rp336 triliun.

Penurunan pendapatan pajak ini sedikit tertahan oleh realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diproyeksikan melampaui target, yakni sebesar Rp575,1 triliun atau 125,2 persen dari pagu Rp459,2 triliun. Kendati demikian, lonjakan PNBP tersebut dinilai belum cukup untuk menutup pembengkakan belanja kementerian dan lembaga.

Akibat seluruh penyesuaian proyeksi ini, keseimbangan primer ikut mengalami pelebaran defisit yang cukup besar menjadi Rp152,1 triliun. Angka tersebut melonjak signifikan dari target awal APBN 2026 yang semula dipatok sebesar Rp89,7 triliun.

Pelebaran defisit yang mendekati batas aman undang-undang sebesar 3 persen ini mengindikasikan bahwa pemerintah membutuhkan pembiayaan yang lebih besar untuk menutup selisih anggaran sebelum tahun fiskal berakhir. Hingga rapat kerja selesai, Kementerian Keuangan belum merinci skenario mitigasi atau penyesuaian pembiayaan baru yang akan ditempuh pemerintah.

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberikan peringatan keras kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait potensi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Parlemen menyoroti proyeksi defisit sepanjang tahun 2026 yang diperkirakan bakal melebar hingga menyentuh Rp734,3 triliun, atau setara dengan 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). (gus,ist kum/dya)

Terkait Pendapatan, Optimistis Lampaui Target

101,7 persen dari target APBN 2026.

Proyeksi tersebut disampaikan Purbaya saat memaparkan Laporan Pelaksanaan APBN Semester I dan Prognosis Semester II Tahun Anggaran 2026 dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Selasa (7/7/2026).

"APBN 2026 dijaga tetap sehat dan berkesinambungan, dengan pembiayaan anggaran yang efisien, defisit terkendali dalam batas aman sebesar 2,85 persen PDB untuk menjaga kredibilitas fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi," ujar Purbaya.

Sepanjang Semester I 2026, realisasi pendapatan negara telah mencapai Rp1.459,4 triliun atau 46,3 persen dari target APBN. Angka tersebut tumbuh 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Purbaya menjelaskan, penerimaan negara ditopang oleh

penerimaan perpajakan sebesar Rp1.187,8 triliun serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp271 triliun. Menurutnya, capaian tersebut didorong oleh meningkatnya aktivitas ekonomi, penguatan tata kelola perpajakan dan kepabeanan, serta membaiknya kualitas layanan kementerian, lembaga, dan Badan Layanan Umum (BLU).

Di sisi belanja, realisasi belanja negara hingga Semester I 2026 mencapai Rp1.656 triliun atau 43,1 persen dari pagu APBN. Nilai tersebut meningkat 17,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Belanja negara digunakan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, subsidi dan kompensasi, hingga transfer ke daerah. (wid,ist/dya)

PEMERINTAH memproyeksikan kinerja fiskal 2026 akan melampaui target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, pendapatan negara hingga akhir tahun diperkirakan mencapai Rp3.208,1 triliun atau

Pemerintah Permudah Akses KPR Tenor 40 Tahun, Tunggakan Kredit Sejuta Disetujui

Pemerintah menyiapkan dua kebijakan untuk memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain menggodok skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan tenor hingga 40 tahun agar cicilan lebih ringan, pemerintah juga mengubah aturan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga tunggakan kredit di bawah Rp1 juta tidak lagi menjadi penghambat pengajuan KPR.

Pemerintah menyiapkan dua kebijakan untuk memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain menggodok skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan tenor hingga 40 tahun agar cicilan lebih ringan, pemerintah juga mengubah aturan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga tunggakan kredit di bawah Rp1 juta tidak lagi menjadi penghambat pengajuan KPR.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan tenor KPR hingga 40 tahun merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempermudah masyarakat memiliki rumah. Menurutnya, dengan tenor yang lebih panjang, cicilan rumah subsidi dapat ditekan hingga di bawah



Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait semprot Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa II, Mulya Permana saat meninjau pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Lingkungan Burujul, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Minggu (5/7/2026).:irt

Rp1 juta per bulan.

"Makin banyak peminatnya buat rumah subsidi karena kan cicilannya bisa jadi makin rendah, bisa di bawah Rp1 juta itu," ujar Ara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa

(7/7/2026).

Ara menjelaskan usulan tersebut telah dibahas bersama BP Tapera, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan OJK. Saat ini pemerintah masih menyusun regulasi

pendukung agar kebijakan tersebut segera diterapkan. Sebelumnya, Prabowo juga menyampaikan tenor cicilan rumah dapat diperpanjang hingga 40 tahun jika diperlukan agar beban angsuran pekerja, petani, dan nelayan menjadi lebih ringan.

Di sisi lain, OJK resmi mengoptimalkan SLIK dengan menetapkan bahwa hanya tunggakan kredit di atas Rp1 juta yang akan ditampilkan dalam riwayat kredit debitur. Ketua Dewan Komisiner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan kebijakan ini bertujuan menjaga penilaian kredit tetap relevan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan rumah dan UMKM. "Penerapan threshold nominal kredit di atas Rp1 juta pada informasi debitur SLIK dilakukan supaya informasi yang digunakan dalam proses penilaian kredit tetap relevan dan proporsional," ujarnya. (wid,gus,ist/dya)

Rapat Moneyv UPT PPP Bulu: Pantau Tangkapan Ikan hingga Optimalisasi Aset Pelabuhan

TUBAN - UPT Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bulu menyelenggarakan Rapat Monitoring dan Evaluasi kegiatan bulan Juni 2026. Pertemuan berlangsung Senin (29/6/2026) di Ruang Pertemuan Cumi-Cumi, lantai 2 kantor UPT PPP Bulu, Tuban.

Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap bulan sebagai sarana meninjau secara menyeluruh capaian kerja. Sekaligus memastikan seluruh operasional pelayanan pelabuhan berjalan lancar, tepat sasaran dan sesuai standar yang ditetapkan.

Ada tiga fokus utama yang menjadi bahasan mendalam dalam rapat kali



ini. Pertama, evaluasi penyerapan kegiatan dan anggaran guna memastikan seluruh program terlaksana secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai jadwal yang direncanakan.

Kedua, tinjauan kondisi hasil tangkapan ikan, meliputi pemantauan tren volume hingga kualitas hasil tangkapan yang bersandar selama sebulan terakhir, yang menjadi

gambaran sekaligus acuan kondisi ekonomi nelayan di wilayah kerja.

Dan ketiga, optimalisasi pemanfaatan aset pelabuhan, dirumuskan strategi agar fasilitas yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi pengguna jasa sekaligus mendorong peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Rapat berlangsung secara terbuka

dan melibatkan seluruh unsur pegawai, mulai dari jajaran Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan Teknis Pelabuhan, Seksi Tatakelola dan Pelayanan Usaha, hingga staf pelaksana, ASN, PPPK, tenaga pendukung, serta petugas keamanan dan kebersihan.

Keterlibatan seluruh elemen ini dimaksudkan agar setiap temuan, catatan perbaikan, maupun keputusan yang diambil dapat dipahami bersama dan dijalankan secara terpadu.

"Kami ingin pastikan tidak ada hal yang terlewat, mulai dari perencanaan hingga pelayanan langsung di lapangan. Semua elemen memiliki peran penting untuk menjaga pelabuhan tetap berjalan baik dan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya," ujar salah satu pemimpin rapat.

Di akhir kegiatan, seluruh peserta menyepakati komitmen bersama untuk lebih meningkatkan kedisiplinan, mempercepat penyelesaian target kerja, serta senantiasa memberikan pelayanan yang prima bagi nelayan dan seluruh pengguna jasa pelabuhan. (adv)

Kasus Penipuan Haji dan Umrah 2026 32 ORANG RESMI TERSANGKA, 3.550 JEMAAH JADI KORBAN

Satuan Tugas (Satgas) Haji dan Umrah Polri mengambil langkah tegas dalam mengusut kasus kejahatan selama musim Haji 2026. Melalui Sub Satgas Penegakan Hukum (Gakkum), kepolisian sejauh ini telah menetapkan 32 orang sebagai tersangka, dengan estimasi total kerugian yang dialami para jemaah korban penipuan mencapai Rp 116 miliar.

Kepala Sub Satgas Gakkum Satgas Haji dan Umrah Polri, Brigjen Mohammad Irhamni, menerangkan bahwa proses hukum ini berjalan mulai dari tingkat Bareskrim Polri hingga ke jajaran Kepolisian Daerah (Polda). Langkah tegas ini diambil demi memberikan efek jera sekaligus menegakkan keadilan bagi para jemaah yang menjadi korban.

"Penegakan hukum dilakukan dengan sinergi dan kolaborasi dengan jajaran kepolisian di level daerah," ungkap Irhamni dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (7/7/2026).

Secara akumulatif, terdapat 64 perkara yang ditangani oleh pihak Satgas, yang terdiri atas 34 laporan polisi (LP) dan 30 laporan informasi (LI). Dari puluhan perkara tersebut, jumlah korban yang terdampak tercatat sebanyak 3.550 orang, dengan nilai kerugian total **menyentuh angka Rp 116.701.700.000 (miliar).**

Irhamni memaparkan sejumlah data pengungkapan kasus yang menonjol di beberapa wilayah kepolisian daerah. Polda Metro Jaya sejauh ini menangani 4 LP dengan jumlah korban yang sangat besar, yakni mencapai 3.000 orang. Dalam perkara di Jakarta ini, satu orang telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dengan nilai kerugian mencapai Rp 95 miliar. Selain di ibu kota, Polda Jawa Timur juga mencatatkan angka yang signifikan dengan menetapkan 13 orang tersangka dari total 145 korban, di mana kerugian di wilayah ini mencapai Rp 9,5 miliar.

"Selain itu, ada Polda Sulawesi Tenggara yang menetapkan 3 tersangka dengan korban sebanyak 282 orang. Kerugian diestimasi mencapai Rp 8,8 miliar," tambahnya.

Pihak kepolisian menegaskan komitmen kuatnya untuk terus memberantas segala bentuk pelanggaran dan kejahatan di sektor haji serta umrah guna menjamin ketenangan masyarakat dalam menjalankan ibadah. Irhamni pun mengimbau agar warga tidak mudah tergiur oleh promosi tarif murah yang tidak masuk akal dari pihak-pihak yang mencurigakan. "Masyarakat perlu terus waspada dan jangan



Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Moh. Irhamni (kedua dari kiri) memberikan keterangan pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta. (Dok.Humas Polri)

tergiur tawaran-tawaran haji dan umrah dengan biaya murah dari pihak yang tidak bertanggung jawab," imbau Irhamni.

Atas kesuksesan penegakan hukum ini, Polri mendapatkan penghargaan resmi dari Kementerian Agama RI dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi yang

digelar di Asrama Haji Jakarta Timur pada Sabtu (4/7). Apresiasi tersebut diberikan atas peran aktif institusi kepolisian dalam memberikan pengamanan, perlindungan jemaah, serta penegakan hukum demi memastikan seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan dengan tertib dan sesuai

Kementerian Haji Usul BPIH 2027 Rp 107 Juta

KOMISI VIII DPR RI menggelar rapat bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dengan agenda utama evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 serta kilas balik tantangan pada musim haji 2025. Di dalam pertemuan yang berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (7/7/2026) tersebut, Kemenhaj mengajukan usulan agar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 2027 dinaikkan sekitar Rp 19 juta, sehingga totalnya menjadi Rp 107 juta.

Langkah ini diambil setelah mencermati dinamika operasional dan inflasi biaya layanan di Arab Saudi yang polanya sudah mulai terbaca sejak dua musim haji terakhir.

Pada musim haji 2025 lalu, tantangan pembiayaan sebenarnya

sudah mulai terasa akibat penyesuaian tarif masyair dan fluktuasi mata uang global, namun pemerintah saat itu masih mampu menahan gejolak harga dengan memaksimalkan subsidi. Memasuki musim haji 2026, tekanan tersebut semakin nyata seiring dengan melonjaknya permintaan global dan perubahan kebijakan akomodasi di tanah suci, yang pada akhirnya memicu pembengkakan realisasi anggaran di lapangan.

Berkaca dari rentetan evaluasi dua tahun berturut-turut itulah, pemerintah merasa perlu melakukan penyesuaian angka estimasi yang lebih realistis untuk tahun depan agar kualitas pelayanan tetap terjaga tanpa mempertaruhkan stabilitas dana haji jangka panjang.

"Usulan BPIH tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi sebesar

dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bersiap mengambil tindakan tegas untuk menertibkan penyelenggara perjalanan serta kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) yang nakal dengan memanfaatkan ibadah suci ini sebagai ladang bisnis yang merugikan masyarakat. Langkah penertiban ini selaras dengan instruksi langsung dari Kepala Negara yang tidak ingin proses ibadah tersebut disalahgunakan demi keuntungan komersial sepihak.

"Presiden menginginkan agar haji dan umrah tidak dijadikan komoditas. Kalau saya boleh menyampaikan dengan bahasa yang lebih luas, stop mengomodifikasi agama," tegas Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak saat memberikan pengarahan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, pada Senin (6/7/2026). (wid,ant,ist/dya)

TOTAL USULAN BIAYA HAJI 2027

- BPIH 2027:
Rp107.340.172,02 per jemaah
- Naik:
Rp19.930.806,57 dibanding tahun sebelumnya.
- Penyebab:
Kenaikan kurs, tiket pesawat, akomodasi di Makkah-Madinah, dan transportasi darat di Arab Saudi.
- Asumsi Kurs:
USD 1 = Rp17.500; SAR 1 = Rp4.666,67.
- Alokasi Anggaran:
56% operasional di Arab Saudi, 43% operasional di dalam negeri.
- Skema Pembiayaan:
60% dari dana Nilai Manfaat, 40% dibayar jemaah (Bipih).



107.340.172,02 rupiah per jemaah," papar Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf di tengah-tengah rapat tersebut. Irfan kemudian menyambung penjelasannya dengan merinci nilai nominal kenaikannya jika disandingkan dengan plafon anggaran yang ditetapkan pada tahun berjalan, "Atau mengalami kenaikan sebesar 19.930.806,57 rupiah." (wid,ist/dya)

6.300 Anak di Kabupaten Malang Tak Pernah Sekolah Sama Sekali

MALANG - Bupati Malang, Sanusi, mengakui sebanyak 6.300 anak di wilayahnya tercatat tidak pernah merasakan duduk di bangku sekolah atau belum pernah mengenyam pendidikan formal sama sekali. Menurut Sanusi, angka tersebut menjadi bagian dari persoalan anak tidak sekolah (ATS) yang jumlah totalnya mencapai 31.677 anak di 2026.

"Ada sebanyak 6.300 anak yang belum pernah sekolah sama sekali. Jangankan putus sekolah, anak-anak tersebut bahkan belum pernah merasakan bersekolah," ujar Sanusi, dikutip pada Selasa (7/7/2026).

Data ATS tersebut mencakup anak pada satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.

Meski masih tinggi, jumlah anak yang belum pernah bersekolah menunjukkan tren menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, jumlahnya tercatat mencapai 6.715 anak. Artinya, terdapat

penurunan sekitar 415 anak pada 2026. Namun Sanusi mengakui, jumlah tersebut menjadi salah satu persoalan serius dalam upaya pemerataan akses pendidikan.

Ditegaskannya, keterbatasan anggaran akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) tidak akan menghentikan upaya Pemkab Malang memperluas akses pendidikan.

Bagi anak-anak yang belum dapat mengikuti pendidikan formal, Pemkab Malang menyiapkan sejumlah alternatif, di antaranya sekolah terbuka dan pendidikan keterampilan.

"Minimal ada pendidikan sekolah terbuka atau pendidikan keterampilan," katanya.

Program tersebut diharapkan dapat menjadi jalan bagi anak-anak yang telanjur tidak bersekolah agar tetap memperoleh bekal pendidikan dan keterampilan untuk masa depan.

Berdasarkan evaluasi Pemkab Malang, rendahnya motivasi anak maupun orang tua masih menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka ATS. Tekanan ekonomi juga

membuat sebagian anak memilih bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Selain itu, pernikahan usia dini turut menjadi faktor yang menyebabkan anak berhenti sekolah.

Untuk mempercepat penanganan persoalan tersebut, menurut Sanusi, Pemkab Malang membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Anak Tidak Sekolah (Satgas Saber ATS).

Satgas tersebut bertugas menyusun kebijakan, melakukan pembinaan, merancang strategi penanganan, serta memantau dan mengevaluasi program pengentasan ATS sedikitnya satu kali dalam setahun.

Dalam pelaksanaannya, Satgas Saber ATS juga akan dibantu kelompok kerja (pokja) yang bertugas menjangkau anak-anak yang belum



Ilustrasi: Bupati Malang, Sanusi meninjau kegiatan siswa SMP Negeri 1 Singosari. (Santi/Lentera)

memperoleh layanan pendidikan.

"Melalui langkah tersebut, Pemkab Malang menargetkan jumlah anak yang belum pernah bersekolah maupun angka ATS secara keseluruhan dapat terus ditekan sehingga akses pendidikan semakin merata di seluruh wilayah Kabupaten Malang," ungkap Sanusi. (Santi/Dya)

Target Investasi Pemkot Malang Capai Rp1,5 T di Semester Awal 2026



Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang, Arif Tri Sastyawan. (Santi/Lentera)

MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menargetkan realisasi investasi pada semester I 2026 sekitar Rp1,5 triliun. Sayangnya meski sudah memasuki bulan Juli, capaian total belum dapat dipastikan karena menunggu data dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kota Malang, Arif Tri Sastyawan mengatakan, data realisasi

investasi terbaru yang telah tercatat masih mengacu pada capaian triwulan I 2026, yakni lebih dari Rp790 miliar.

"Hingga saat ini, capaian investasi yang telah tercatat masih mengacu pada realisasi triwulan I 2026 sebesar lebih dari Rp792 miliar," ujar Arif, Selasa (7/7/2026).

Menurutnya, capaian tersebut masih berada pada jalur target per triwulan yang telah ditetapkan. Sedangkan sepanjang 2026, Pemkot Malang mematok target investasi tahunan sebesar Rp3,3 triliun. "Kalau triwulan I sesuai target. Target kami Rp3,3 triliun, itu target akumulasi satu tahun," katanya.

Dengan target tersebut, Arif menyebut realisasi investasi hingga akhir semester I setidaknya diharapkan mencapai sekitar separuh

dari target tahunan atau berada di kisaran Rp1,5 triliun. "Paling tidak kami harus bisa dapat separuhnya dari total target tahunan. Berarti Rp1,5 triliun," katanya.

"Kalau yang semester I masih menunggu dari provinsi. Capaiannya yang Rp792 sekian miliar itu mulai perhitungan Januari sampai triwulan pertama. Kalau semester I belum, masih menunggu," imbuhnya.

Arif menjelaskan, pendataan investasi dilakukan berdasarkan periode pelaporan pelaku usaha. Pada periode sebelumnya, pendataan antara lain menasar sektor hotel mewah. Sementara pada periode berikutnya, pelaporan akan mencakup hotel berbintang serta kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah dan tinggi.

Laporan tersebut selanjutnya akan dihimpun sebagai bagian dari penghitungan realisasi investasi pada triwulan III dan IV. "Sehingga di triwulan III dan IV nanti kami kumpulkan laporannya," imbuhnya.

Lebih lanjut, Arif mengakui kondisi perekonomian saat ini turut memengaruhi iklim investasi. Selain itu, kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pelaporan masih menjadi salah satu kendala dalam proses pendataan realisasi investasi. Disebutkannya, masih terdapat pelaku usaha yang terlambat atau belum menyampaikan laporan kegiatan usahanya sesuai periode yang ditentukan.

"Kendalanya kalau investasi, melihat kondisi ekonomi saat ini juga berpengaruh. Kemudian biasanya pengusaha ini lupa untuk melaporkan kewajiban per semester maupun per triwulan," ungkapnya.

Di sisi lain, Arif memastikan hingga saat ini belum terdapat laporan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dari perusahaan di Kota Malang. Ia mengakui terdapat satu hingga dua kasus PHK. Namun, persoalan tersebut telah ditangani dan diselesaikan melalui mekanisme hubungan industrial. (Santi/Dya)

DUA BOM GUNCANG DAMASKUS SAAT KUNJUNGAN BERSEJARAH MACRON

Jantung kota Damaskus diguncang dua ledakan bom rakitan beruntun pada Selasa (7/7/2026), tepat di tengah kunjungan kenegaraan bersejarah Presiden Prancis, Emmanuel Macron. Insiden yang terjadi di dekat Hotel Four Seasons, lokasi delegasi Prancis menginap tersebut melukai sedikitnya 18 orang, termasuk empat personel kepolisian setempat. Pihak Istana Élysée memastikan Macron berada dalam kondisi aman dan menolak tunduk pada aksi teror dengan tetap melanjutkan agenda diplomasinya.

Kunjungan ini sejatinya merupakan momen krusial bagi peta politik Timur Tengah. Macron mencatatkan diri sebagai kepala negara Uni Eropa dan pemimpin Barat pertama yang menginjakkan kaki di Suriah sejak runtuhnya rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024 lalu. Namun, alih-alih disambut dengan ketenangan, kedatangan sang pemimpin Prancis justru diuji oleh sisa-sisa instabilitas keamanan yang masih menghantui negara transisi tersebut.

Berdasarkan laporan resmi Kementerian Dalam Negeri Suriah dan rilis media asing seperti Reuters dan Associated Press (AP), insiden tersebut terjadi pada Selasa pagi waktu setempat. Dua buah bom rakitan berkekuatan sedang diketahui telah disusupkan di kawasan sibuk yang terletak di antara Kementerian Pariwisata Suriah dan Hotel Four Seasons.

Ledakan tidak terjadi secara mendadak, melainkan saat aparat keamanan sedang melakukan sterilisasi.

Bom pertama disembunyikan di dalam sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan, sementara bom kedua ditanam secara acak di dalam tempat sampah umum tak jauh dari lokasi pertama.

"Dua ledakan bom rakitan, satu di dalam kendaraan dan satu di tempat sampah, meledak saat persiapan sedang dilakukan oleh tim penjinak untuk membongkar dan menjinakkannya," demikian pernyataan resmi dari Kementerian

Dalam Negeri Suriah yang dikutip medianasional.

Akibatnya, belasan orang yang berada di sekitar lokasi, termasuk petugas yang mencoba menjinakkan bom, menjadi korban. Sebanyak 18

orang dilarikan ke rumah sakit terdekat akibat luka terkena serpihan (shrapnel) dan efek kejut ledakan. Asap hitam sempat membubung tinggi di langit Damaskus, memicu kepanikan

Sidang Perdana Parlemen Transisi Ditunda

PROSES transisi politik di Suriah kembali menemui jalan buntu setelah pemerintah secara mendadak mengumumkan penundaan sesi pertama parlemen transisi baru yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (6/7/2026).

Langkah ini memicu kekhawatiran baru di kalangan pengamat internasional mengenai stabilitas politik dalam negeri pascatumbuhnya rezim lama.

Melalui saluran televisi pemerintah, Mohammed Taha al-Ahmad selaku ketua Komite Tinggi Pemilihan Parlemen, mengumumkan penangguhan sidang tersebut. Otoritas Suriah memilih tidak membeberkan alasan spesifik di balik keputusan ini dan hanya menyatakan bahwa tanggal pertemuan pengganti akan ditentukan di kemudian hari.

Penundaan ini terjadi hanya berselang beberapa hari setelah Presiden Interim Suriah, Ahmed al-Sharaa, merampungkan pengangkatan 70 legislator terakhir untuk menggenapi struktur parlemen transisi yang beranggotakan total 210

orang. Berdasarkan konstitusi sementara, dua pertiga dari anggota parlemen dipilih melalui mekanisme dewan pemilihan lokal, sementara sepertiga sisanya ditunjuk langsung oleh kendali presiden.

Pembentukan Majelis Nasional yang baru ini sejatinya dipandang sebagai pilar krusial bagi peta jalan (roadmap) demokrasi Suriah setelah runtuhnya pemerintahan mantan Presiden Bashar al-Assad pada akhir tahun 2024 yang mengakhiri 13 tahun perang saudara. Parlemen transisi ini dirancang untuk menjabat selama 30 bulan dengan mandat berat yaitu meninjau ulang dan memberlakukan undang-undang baru, menyusun regulasi pemilu, serta mempersiapkan pemilihan umum definitif berikutnya.

Kendati demikian, langkah tersebut tidak berjalan mulus.

massal di kawasan yang biasanya dijaga ketat tersebut.

Meskipun ledakan terjadi cukup dekat dengan basis akomodasi delegasi Prancis, Istana Élysée segera mengeluarkan pernyataan bahwa rombongan kepresidenan maupun jurnalis Prancis yang menyertai Macron tidak mendengar langsung suara ledakan tersebut.

Saat bom meledak, Macron dilaporkan sudah meninggalkan hotel dan berada dalam perjalanan aman menuju Istana Kepresidenan Suriah untuk melangsungkan pertemuan empat mata dengan Perdana Menteri sekaligus pemimpin transisi Suriah, Ahmed al-Sharaa (yang sebelumnya dikenal sebagai Abu Mohammad al-Julani).

Alih-alih menghentikan lawatan atau langsung terbang kembali ke Paris, Macron memilih menunjukkan sikap tegas. Melalui pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa aksi kekerasan tersebut tidak akan mengubah komitmen Prancis terhadap masa depan Suriah.

"Tidak ada yang dapat membungkam aspirasi perempuan dan laki-laki Suriah untuk hidup di negara yang sepenuhnya berdaulat, aman, pluralis, dan bersatu. Kunjungan saya tetap berlanjut," tegas Macron melalui pernyataan resmi yang disebarkan oleh saluran diplomatik Prancis. (gus,rtr;bbc/dya)



Berbagai organisasi kemasyarakatan dan pengamat politik melayangkan kritik tajam terhadap mekanisme pembentukan parlemen ini. Mereka menilai proses pemilihan kurang representatif dan mengindikasikan adanya pemusatan kekuasaan yang terlalu besar di tangan Presiden Ahmed al-Sharaa, mengingat terbatasnya fungsi legislatif dalam sistem pemerintahan presidensial transisi saat ini. (gus, vna/dya)

Mengenal Fibermaxxing, Tren Diet 2026 Penuh Serat

Belakangan ini, media sosial diramaikan dengan berbagai tren pola makan sehat yang diklaim mampu meningkatkan kualitas hidup. Setelah sebelumnya muncul berbagai metode diet yang berfokus pada pembatasan kalori, mengurangi karbohidrat, hingga puasa intermiten, kini perhatian banyak orang beralih pada tren baru bernama fibermaxxing.

Berbeda dari sebagian besar tren diet yang identik dengan berbagai pantangan makanan, fibermaxxing justru mengusung konsep yang lebih sederhana. Alih-alih meminta seseorang mengurangi porsi makan atau menghindari kelompok makanan tertentu, pola makan ini mendorong masyarakat untuk menambah asupan serat melalui konsumsi buah, sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, serta gandum utuh.

Pendekatan tersebut membuat fibermaxxing dinilai lebih mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak sedikit orang yang mulai tertarik karena konsepnya terasa lebih realistis dan tidak memberikan tekanan berlebihan. Pada dasarnya, seseorang tetap dapat menikmati makanan favoritnya, namun diimbangi dengan memperbanyak makanan yang kaya serat sehingga kualitas pola makan menjadi lebih baik.

1Meski istilah fibermaxxing baru populer di media sosial sepanjang 2026, konsep yang diusung sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Para ahli gizi telah lama menyarankan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan serat harian sebagai bagian dari pola makan sehat dan seimbang.

Fibermaxxing merupakan pola makan yang berfokus pada peningkatan konsumsi serat alami setiap hari. Serat diperoleh dari berbagai jenis makanan nabati, seperti buah-buahan, sayuran hijau, kacang-kacangan, biji-bijian, hingga produk gandum utuh.

Berbeda dengan diet yang mengutamakan pembatasan makanan, fibermaxxing lebih menekankan pada penambahan makanan bernutrisi ke dalam menu harian. Karena itu, banyak orang menilai metode ini lebih mudah dijalankan dalam jangka panjang.

Di media sosial, tren ini biasanya ditampilkan melalui berbagai menu penuh warna yang terdiri dari aneka buah segar, salad, oatmeal, yoghurt dengan tambahan biji-bijian, hingga camilan sehat berbahan dasar kacang-kacangan. Tujuannya bukan sekadar membuat tampilan makanan lebih menarik, tetapi juga memastikan tubuh memperoleh asupan serat yang cukup setiap hari.

Serat merupakan salah satu jenis karbohidrat yang tidak dapat dicerna sepenuhnya oleh tubuh. Meskipun demikian, keberadaannya memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan.

Salah satu manfaat paling dikenal adalah membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus sehingga proses pembuangan sisa makanan menjadi lebih teratur dan risiko sembelit dapat berkurang.

Selain itu, serat juga menjadi makanan bagi bakteri baik yang hidup di usus. Mikroorganisme tersebut berperan dalam menjaga keseimbangan mikrobiota usus yang

berkaitan dengan sistem pencernaan, daya tahan tubuh, hingga kesehatan secara menyeluruh.

Membantu Kenyang Lebih Lama

Salah satu alasan fibermaxxing banyak diminati adalah kemampuannya membantu mengontrol rasa lapar. Makanan tinggi serat membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna dibandingkan makanan rendah serat.

Proses pencernaan yang lebih lambat membuat perut terasa kenyang lebih lama sehingga keinginan untuk mengonsumsi camilan di sela waktu makan dapat berkurang.

Karena alasan tersebut, pola makan tinggi serat sering menjadi bagian dari program pengelolaan berat badan. Bukan karena membuat seseorang harus makan lebih sedikit, tetapi karena rasa kenyang bertahan lebih lama sehingga asupan kalori secara keseluruhan dapat lebih terkontrol.

Jaga Gula Darah Tetap Stabil

Serat juga berperan dalam memperlambat penyerapan gula dari makanan ke dalam aliran darah. Dengan demikian, lonjakan kadar gula darah setelah makan dapat diminimalkan. Kondisi ini sangat bermanfaat untuk membantu menjaga kestabilan energi sepanjang hari sekaligus mendukung kesehatan metabolisme tubuh.

Inilah sebabnya makanan tinggi serat sering dianjurkan sebagai bagian dari pola makan sehat, terutama bagi mereka yang ingin menjaga kadar gula darah tetap stabil.

Baik untuk Kesehatan Jantung

Tak hanya berdampak pada sistem pencernaan, konsumsi serat yang cukup juga berkaitan dengan kesehatan jantung.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pola makan tinggi serat dapat membantu menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat.

Dengan kadar kolesterol yang lebih terkontrol, risiko penyakit jantung dan gangguan pembuluh darah juga dapat ditekan.

Karena manfaat tersebut, para ahli gizi selama bertahun-tahun terus mendorong masyarakat untuk memperbanyak konsumsi makanan alami yang kaya serat sebagai bagian dari gaya hidup sehat.

Berapa Kebutuhan Serat Harian?

Agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal, konsumsi serat perlu disesuaikan dengan kebutuhan tubuh.

Secara umum, perempuan dewasa dianjurkan mengonsumsi sekitar 25 gram serat per hari, sedangkan laki-laki sekitar 38 gram per hari. Sayangnya, banyak orang masih belum memenuhi angka tersebut karena pola makan modern cenderung didominasi makanan olahan yang rendah serat.

Padaahal, kebutuhan tersebut sebenarnya dapat dipenuhi melalui kebiasaan sederhana, seperti menambahkan sayuran pada setiap waktu makan, mengonsumsi buah sebagai camilan, memilih roti gandum utuh, atau mengganti nasi putih dengan sumber karbohidrat yang lebih kaya serat sesekali. (ist/dya)

Waspada! Celah Keamanan AirDrop dan Quick Share Bisa Ganggu Miliaran Smartphone

Kemudahan berbagi foto, video, dokumen, hingga berbagai jenis file dalam hitungan detik telah menjadikan AirDrop di perangkat Apple dan Quick Share di Android sebagai fitur andalan banyak pengguna smartphone. Tanpa perlu kabel atau aplikasi tambahan, proses transfer file dapat dilakukan secara praktis hanya dengan memanfaatkan koneksi nirkabel.

Namun, di balik kemudahan tersebut, para peneliti keamanan siber baru-baru ini menemukan adanya celah keamanan yang berpotensi

dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggungjawab.

Temuan tersebut berasal dari tim peneliti di CISPA Helmholtz Center for Information Security yang mengungkap adanya kerentanan pada mekanisme komunikasi AirDrop dan Quick Share.

Celah ini memang tidak memungkinkan pelaku mencuri foto, dokumen, atau data pribadi pengguna secara langsung. Namun, eksploitasi yang dilakukan dapat menyebabkan fitur berbagi file tersebut berhenti berfungsi sehingga mengganggu

aktivitas pengguna. Menurut hasil penelitian, seorang peretas hanya membutuhkan sebuah laptop yang terhubung ke jaringan Wi-Fi dan berada dalam radius sekitar 10 hingga 30 meter dari perangkat target. Dengan memanfaatkan kelemahan pada proses komunikasi antarpiranti, pelaku dapat mengirimkan permintaan yang dirancang secara khusus untuk memicu gangguan pada sistem.

Pada perangkat Apple, kerentanan ditemukan pada daemon atau layanan yang berjalan di latar belakang dan bertugas mengelola berbagai fitur ekosistem Apple, seperti AirDrop, AirPlay, Handoff, Universal Clipboard, hingga Continuity Camera.

Layanan ini memungkinkan seluruh perangkat Apple saling terhubung secara mulus, tetapi di sisi lain menjadi titik yang dapat dimanfaatkan apabila ditemukan kelemahan keamanan.

Peneliti menjelaskan bahwa hanya dengan satu permintaan yang memiliki format tidak valid, sistem dapat mengalami crash. Jika permintaan serupa dikirimkan secara berulang setiap beberapa detik, layanan yang mendukung AirDrop dan fitur-fitur terkait berpotensi terus mengalami gangguan sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Kondisi ini dapat membuat pengguna kehilangan akses terhadap berbagai fitur berbagi file dan sinkronisasi perangkat hingga masalah tersebut diatasi.

Pengujian juga dilakukan terhadap Quick Share pada perangkat Samsung Galaxy S23 Ultra serta aplikasi Quick Share untuk sistem operasi Windows. Dari pengujian tersebut ditemukan adanya celah yang memungkinkan pelaku melewati proses autentikasi tertentu.

Selain itu, peneliti juga mengidentifikasi bug yang berkaitan dengan kerusakan memori pada klien Quick Share untuk Windows, yang berpotensi mengganggu stabilitas layanan.

Meski demikian, pengguna tidak perlu panik. Berdasarkan hasil penelitian, kerentanan ini lebih mengarah pada serangan yang menyebabkan gangguan layanan (denial of service) dibandingkan pencurian data. Artinya, foto, video, maupun dokumen yang tersimpan di perangkat tidak otomatis dapat diakses atau dicuri oleh peretas melalui celah tersebut. Dampak yang paling mungkin dirasakan pengguna adalah kegagalan mengirim atau menerima file menggunakan AirDrop maupun Quick Share ketika serangan berlangsung.

Kabar baiknya, pengembang perangkat lunak telah bergerak cepat merespons temuan tersebut. Apple dilaporkan telah menutup satu dari tiga celah keamanan yang ditemukan melalui pembaruan sistem operasi terbaru.

Sementara itu, Google juga telah merilis perbaikan untuk aplikasi Quick Share versi Windows. Adapun beberapa kerentanan lain masih berada dalam proses penanganan dan koordinasi antara peneliti dengan pengembang agar dapat ditutup melalui pembaruan berikutnya. (ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTHYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I **SIDOARJO:** TEGUH A I **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH I **LAMONGAN:** L HANDI I **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA I **KEDIRI:** AIS I **JOMBANG:** SUTONO I **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO I **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO I **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I **TRENGGALEK:** HERLAMBAH I **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN I **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN I **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN I **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA I **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 I **TELP** 03187854491 I **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I **TELP IKLAN** 031-87854491 I **NIB** 91205006801134 I **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap tugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Ingin Wajah Tampak Lebih Tirus? Coba Tips Memakai Hijab Ini

Bagi banyak hijabers, memilih hijab bukan sekadar soal warna atau mengikuti tren mode. Cara mengenakan hijab juga dapat memengaruhi keseluruhan penampilan, termasuk memberikan ilusi bentuk wajah yang tampak lebih proporsional.

Tak heran, pemilik wajah bulat atau pipi chubby kerap mencari teknik styling yang mampu membuat wajah terlihat lebih panjang dan tirus tanpa harus mengubah bentuk wajah secara permanen.

Kabar baiknya, efek tersebut sebenarnya dapat diperoleh melalui pemilihan bahan, model, hingga teknik memakai hijab yang tepat. Dengan beberapa penyesuaian sederhana, tampilan wajah bisa terlihat lebih seimbang, elegan, dan tetap nyaman digunakan sepanjang hari.

Pilihan Bahan

Salah satu hal pertama yang perlu diperhatikan adalah memilih bahan hijab yang mudah dibentuk. Bahan yang terlalu tebal atau kaku cenderung menambah volume di sekitar pipi dan rahang sehingga wajah terlihat lebih penuh.

Sebaliknya, bahan yang ringan dan fleksibel, seperti voal, lebih mudah mengikuti kontur wajah tanpa memberikan kesan mengembang.

Selain nyaman dikenakan, hijab berbahan voal juga dikenal mudah dirapikan sehingga menghasilkan tampilan yang rapi dan natural.

Model Hijab

Selain bahan, model hijab yang digunakan juga berperan penting. Banyak orang beranggapan bahwa hijab yang dipasang sangat ketat akan membuat wajah tampak lebih kecil. Padahal, hijab yang terlalu menempel justru dapat mempertegas bentuk wajah bulat.

Styling yang sedikit longgar, terutama menggunakan pashmina berbahan chiffon atau ceruti, justru mampu menciptakan ilusi wajah yang lebih memanjang. Biarkan lipatan hijab jatuh secara alami tanpa terlalu banyak jarum pentul agar hasil akhirnya terlihat ringan dan elegan.

Teknik Melipat

Teknik melipat hijab di bagian samping wajah juga bisa menjadi trik sederhana yang memberikan perubahan cukup signifikan. Lipatan yang sedikit menutupi area tulang pipi mampu menyamarkan lebar wajah sehingga garis wajah terlihat lebih tegas. Teknik ini banyak dijumpai pada gaya hijab Timur Tengah yang dikenal

mampu menciptakan siluet wajah lebih lonjong tanpa memerlukan aksesoris tambahan.

Perhatikan Inner

Hal lain yang sering luput dari perhatian adalah pemilihan ciput atau inner hijab. Bagi pemilik wajah bulat, ciput ninja menjadi salah satu pilihan yang cukup direkomendasikan.

Bentuknya membantu membingkai wajah dengan lebih rapi sekaligus memberikan kesan wajah yang lebih panjang. Kini ciput ninja tersedia dalam berbagai model dan bahan yang nyaman sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan aktivitas sehari-hari.

Hindari Lilitan di Leher

Agar ilusi wajah tirus semakin maksimal, hindari kebiasaan melilit hijab terlalu banyak di area leher. Tumpukan kain yang berlebihan membuat leher tampak lebih pendek dan memberikan kesan wajah yang lebih penuh. Sebaliknya, gaya hijab yang menjuntai sederhana akan menciptakan garis vertikal yang membuat tubuh dan wajah terlihat lebih jenjang.

Pemilihan Warna

Pemilihan warna juga memberikan pengaruh terhadap kesan visual. Hijab berwarna gelap, seperti hitam, navy, atau cokelat tua, dikenal mampu menciptakan efek wajah yang tampak lebih ramping. Warna-warna tersebut menyerap perhatian sehingga kontur wajah terlihat lebih tegas. Meski demikian, warna hijab tetap sebaiknya disesuaikan dengan warna busana agar keseluruhan penampilan tetap harmonis.

Perhatikan Motif

Selain warna, motif hijab juga perlu diperhatikan. Motif berukuran besar atau terlalu ramai cenderung menarik fokus ke area wajah sehingga memberikan kesan lebih lebar.

Sebaliknya, motif kecil, garis-garis halus, atau desain minimalis lebih aman dipilih karena mampu menciptakan tampilan yang lebih seimbang dan tidak berlebihan.

Bros yang Tepat

Sentuhan akhir yang tak kalah penting adalah penggunaan aksesoris. Memang, bros atau aksesoris hijab dapat mempercantik penampilan, terutama saat menghadiri acara formal.

Namun, aksesoris yang terlalu besar justru membuat area kepala terlihat lebih penuh. Untuk menghasilkan kesan wajah yang lebih ramping, pilihlah aksesoris berukuran kecil atau gunakan secukupnya.

Tampilan yang sederhana justru sering kali terlihat lebih elegan dan berkelas. Pada akhirnya, berbagai teknik styling tersebut hanyalah trik untuk membantu menciptakan ilusi visual.

Yang paling penting adalah memilih gaya hijab yang membuat pemakainya merasa nyaman dan percaya diri. (ist/dya)



Lagi-lagi Nyawa ...dari hal 1

Dunia pendidikan kedokteran spesialis kembali dilingkari duka mendalam sekaligus sorotan tajam setelah dr. Adrian Rantung, seorang peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesiologi di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya di Manado pada 5 Juli 2026.

Almarhum ditemukan tak bernyawa setelah dilaporkan mangkir dari jadwal tugas klinisnya di RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou. Tragedi ini seketika memicu gelombang kemarahan publik, di mana kuat dugaan bahwa korban nekat mengakhiri hidupnya akibat tidak kuat menahan hantaman tekanan mental berat dan kultur perundungan senioritas yang masif di lingkungannya.

Merespons peristiwa fatal tersebut, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bergerak cepat mengambil tindakan ekstrem. Berdasarkan Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado Nomor HK.02.03/D.XV/3421/2026 tertanggal 6 Juli 2026, pemerintah resmi menghentikan sementara seluruh kegiatan pembelajaran klinik Program Studi Anestesiologi di rumah sakit tersebut.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menegaskan bahwa proses investigasi mendalam kini tengah berjalan secara ketat bersama kementerian terkait demi mengusut tuntas penyebab kematian korban.

"Kasus ini masih dalam proses investigasi oleh tim gabungan Kemenkes, Konsil Kedokteran Indonesia, Kolegium Anestesi, dan Kemendiknas. Yang dihentikan hanya kegiatan pendidikannya, bukan prodinya," ujar Aji Muhawarman Selasa (7/7/2026). Kemenkes berjanji akan membuka kembali aktivitas PPDS di RS Kandou setelah tim investigasi merilis hasil resmi.

Di sisi lain, pihak Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado menyatakan masih menunggu hasil investigasi komprehensif tersebut. Rektorat Unsrat langsung menggelar pertemuan tertutup dengan jajaran manajemen RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou untuk mengumpulkan fakta lapangan. Pihak kampus mengakui belum bisa menjabarkan secara rinci mengenai detail kronologis yang memicu keputusan fatal sang residen.

"Jadi, belum ada informasi secara akurat tentang kasus itu. Karena, rektor dengan pihak pimpinan rumah sakit di jam ini sementara meeting," ujar Kepala Humas Unsrat, Max Rembang, Selasa (7/7/2026).

Sikap tegas juga datang dari organisasi profesi. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) melayangkan kecaman keras atas berulangnya tragedi yang menimpa dokter residen.

Ketua Umum PB IDI, Slamet Budiarto, menyatakan bahwa lingkungan pendidikan kedokteran harus bersih dari tindakan intimidatif dan menuntut akuntabilitas penuh dari pimpinan rumah sakit.

"IDI mengecam dan tidak mentolerir segala bentuk perundungan. Direktur Utama Rumah Sakit harus bertanggung jawab penuh terhadap segala bentuk perundungan di dalam rumah sakit," tegas Slamet Budiarto, Selasa (7/7/2026).

Sebagai langkah konkret jangka panjang, IDI mendesak Kemenkes untuk merombak regulasi beban kerja residen yang dinilai tidak manusiawi. Slamet meminta ketentuan batasan kerja dokter PPDS yang saat ini mencapai 80 jam per minggu dipangkas hampir separuhnya. "Solusinya batasi jam kerja maksimal 40-50 jam per minggu

atau 8-9 jam per hari," tuturnya.

Tragedi maut di Manado ini menjadi titik kulminasi dari rentetan kelam yang merontokkan benteng psikologis para tenaga medis muda di Indonesia sepanjang paruh pertama tahun 2026. Hanya berselang sekitar satu minggu sebelum kematian dr. Adrian, publik lebih dulu dihenyakkan oleh wafatnya dr. Elisa Princilia Utami Pakaenoni (dr. Icha) di Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT, pada 26 Juni 2026.

Dokter umum berusia 27 tahun tersebut mengembuskan napas terakhir di ruang perawatan intensif akibat gangguan kesehatan mental dan trauma psikologis berat pasca-menerima intimidasi verbal bernuansa kekuasaan dari tiga oknum anggota DPRD setempat saat ia sedang melayani pasien.

Insiden ini memicu solidaritas korps medis hingga tiga anggota DPRD tersebut kini terancam hukuman 7 tahun penjara, sementara Kemenkes mulai menyusun Rancangan Perpres tentang Perlindungan Keamanan dan Keselamatan Tenaga Medis. (wid,rls,kum,ist/dya)

Status WA Terakhir: Aku hanya Perlahan Hanyut Menjauh

DI BALIK helai jas putih, gelar akademik yang terhormat, dan tuntutan profesionalisme yang tinggi, seorang dokter tetaplah manusia biasa yang memiliki batas rapuh. Tragedi memilukan kembali mengguncang dunia kedokteran tanah air seiring dengan kabar meninggalnya dr. Adrian Rantung, seorang dokter muda yang tengah menempuh Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesiologi di Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi (Unsrat).

Kematian dr. Adrian segera memicu gelombang simpati sekaligus sorotan tajam di media sosial. Publik mendadak riuh setelah sebuah tangkapan layar yang diduga sebagai status WhatsApp terakhir almarhum beredar luas, salah satunya diunggah oleh akun X @tb_siswadi pada Selasa (7/7/2026). Pesan singkat itu seketika berubah menjadi potret kelam mengenai beratnya tekanan psikologis yang ia pikul sendirian sebelum mengembuskan napas terakhir.

Dalam status tersebut, dr. Adrian menuliskan untaian kalimat yang menyayat hati:

"Tidak ada lagi semangat untuk

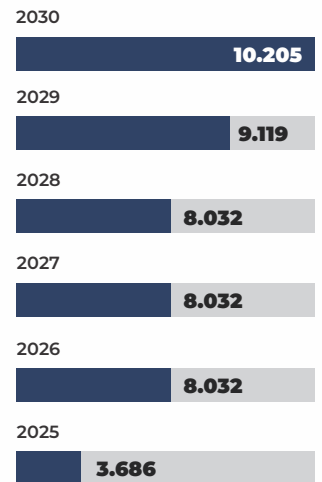
berjuang dalam diriku. Bukan karena aku lemah, tapi karena tidak ada lagi yang terasa layak untuk diperjuangkan. Aku bukan menyerah, aku hanya perlahan hanyut menjauh."

Kalimat demi kalimat mengalir layaknya sebuah pengakuan jujur dari jiwa yang telah mengalami kelelahan emosional teramat dalam (burnout ekstrem). Frasa "bukan karena aku lemah" seolah menjadi penegasan penting bagi siapa saja yang membaca. Sebagai seorang dokter yang berhasil menembus ketatnya seleksi PPDS, dr. Adrian jelas bukan individu yang rapuh.

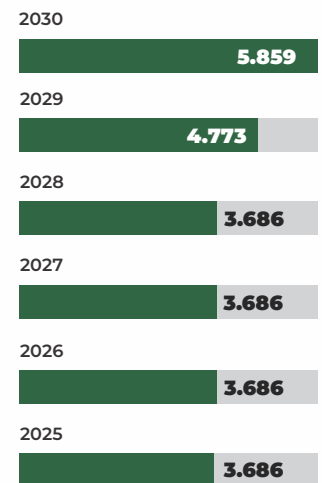
Namun, ketangguhan mentalnya runtuh ketika ia harus menghadapi realitas di mana "tidak ada lagi yang terasa layak untuk diperjuangkan." Pernyataan ini merefleksikan hilangnya harapan (hopelessness) secara total terhadap lingkungan sekitarnya.

Hingga kini, pihak berwenang masih melakukan investigasi resmi untuk mengungkap penyebab pasti di balik kematian dr. Adrian. Kendati demikian, pesan terakhirnya terlanjur membuka tabir gelap yang selama ini kerap menyelimuti sistem pendidikan kedokteran spesialis di

KUOTA MAHASISWA PRODI DOKTER SPESIALIS



ESTIMASI JUMLAH LULUSAN PRODI DOKTER SPESIALIS



Indonesia. Jam kerja yang melampaui batas wajar, beban akademik yang mencekik, tanggung jawab nyawa pasien, hingga dugaan praktik perundungan oleh senior kini kembali mencuat ke permukaan.

Kematian dr. Adrian seolah menjadi alarm keras yang berbunyi nyaring. Merespons tragedi ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bergerak cepat dengan menghentikan sementara kegiatan pendidikan PPDS Anestesiologi di RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou, Manado.

Melalui status singkatnya yang kini abadi, dr. Adrian tidak sekadar berpamitan untuk "hanyut menjauh." Ia secara tidak langsung telah meninggalkan sebuah warisan berupa desakan besar bagi dunia medis: bahwa lingkungan pendidikan kedokteran yang aman, sehat, dan bebas dari kekerasan adalah hal mutlak yang tidak bisa ditawar lagi. (wid,ist/dya)

PRAPERADILAN ROY SURYO DIKABULKAN: PENGGELEDAHAN-PENANGKAPAN CACAT HUKUM

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait penggeledahan, penangkapan, dan penahanan oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait tuduhan ijazah palsu. Putusan dibacakan hakim tunggal I Ketut Darpawan dalam sidang yang digelar pada Selasa (7/7/2026).

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan permohonan praperadilan Roy Suryo dikabulkan untuk sebagian. "Mengadili, satu

KRONOLOGI KASUS ROY SURYO

2025

- 7 Jul: Diperiksa sebagai terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi.
- 21 Jul: Ajukan permohonan gelar perkara khusus.
- 24 Okt: Terima salinan legalisir ijazah Jokowi dari KPU.
- 7 Nov: Ditetapkan sebagai tersangka; Roy menyatakan menghormati proses hukum.
- 20 Nov: Dicekal ke luar negeri dan wajib lapor.
- 18 Des: Gelar perkara khusus, penyidik menunjukkan ijazah asli Jokowi.

2026

- 11 Feb: Penuhi wajib lapor.
- 17-25 Apr: Sebagian tersangka mendapat SP3, perkara Roy tetap berlanjut.
- 18 Jun: Rumah Roy digeledah.
- 19 Jun: Ditangkap dan ditahan.
- 22 Jun: Ajukan praperadilan pertama.
- 3 Jul: Ajukan praperadilan kedua.
- 7 Jul: Praperadilan dikabulkan sebagian; penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dinyatakan tidak sah, namun status perkara pokok belum diputus.



ROY SURYO tampak memamerkan kaus dengan tulisan "PASTI DI OPLOS!" sesaat setelah dia memenangkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2026). Menurutnya, tulisan di kausnya itu merupakan bentuk sindiran tajam terhadap sistem peradilan transisi di Indonesia.

Roy menilai penegakan hukum saat ini sedang berada dalam fase "laboratorium" yang semrawut karena aparat penegak hukum mencampuradukkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) lama dengan instrumen hukum pidana yang baru layaknya barang oplosan.



Roy Suryo usai menjalani sidang putusan praperadilan atas penangkapannya dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di PN Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2026).ist

mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian," ujar Hakim I Ketut Darpawan saat membacakan putusan.

Hakim juga menyatakan penggeledahan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya pada 18

Juni 2026, serta penangkapan dan penahanan Roy Suryo pada 19 Juni 2026, tidak sah. Selain itu, biaya perkara ditetapkan nihil. Putusan tersebut diambil setelah hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang terungkap selama persidangan.

Sindir Lewat Kaus 'Pasti Di Oplos!'

"Meskipun tadi hakim sekali lagi menggunakan KUHP lama dan KUHP baru, maka itu namanya 'dioplos'. Karena putusannya seperti ini, maka saya pakai baju oplos," ujar Roy kepada awak media usai persidangan.

Meski melontarkan kritik keras terhadap regulasi yang tumpang tindih, Roy tetap mengapresiasi putusan hakim tunggal PN Jakarta Selatan.

Dalam putusannya, hakim mengabulkan permohonan Roy dan secara resmi menyatakan bahwa proses penangkapan, penahanan, serta penggeledahan terhadap dirinya tidak sah secara hukum dan batal demi hukum.

Kemenangan ini tak menyurutkan langkah perlawanan Roy Suryo. Pihaknya menyatakan menolak segala bentuk kompromi atau restorative justice dan sedang menyiapkan manuver hukum balasan.

Di sisi lain, Majelis hakim menolak permohonan praperadilan Roy Suryo yang meminta agar penetapan

tersangka dalam kasus pencemaran nama baik terkait ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak sah.

Dengan penolakan tersebut, majelis hakim menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya kepada Roy Suryo dalam kasus pencemaran nama baik terkait ijazah palsu Jokowi sah secara hukum.

Keputusan tersebut dibacakan majelis hakim tunggal, I Ketut Darpawan, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Ragunan, Selasa (7/7/2026).

Hakim Ketut menjelaskan bahwa pengujian terhadap penetapan tersangka ditujukan pada aspek formil, yakni apakah penetapan tersebut telah didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP, dan apakah sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka telah dilakukan pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu..(ist,tin,ini/dya

Menanggapi putusan tersebut, Roy Suryo menyebutnya sebagai titik awal perubahan dalam penegakan hukum di Indonesia. "Hari ini Selasa, 7 Juli 2026, adalah dimulainya babak baru dari hukum Indonesia. Laboratorium hukum di Indonesia dengan menggunakan tata perundang-undangan yang baru. Meskipun tadi pertimbangannya tetap menggunakan yang lama, itu sudah kita mulai hari ini," kata Roy kepada wartawan usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Roy menegaskan kemenangan praperadilan itu bukan hanya untuk kepentingan pribadinya, melainkan diharapkan menjadi langkah memperbaiki sistem hukum nasional. "Ini hukum bukan untuk saya, bukan untuk Roy Suryo dan Tim Kuasa Hukum THOKHAM yang hari ini mendampingi saya, tetapi ini adalah untuk kita semuanya," ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada hakim tunggal yang memeriksa perkara tersebut. "Terima kasih, matur suksma, Pak Ketut, atas pertimbangannya yang sangat luar biasa. Jadi itu benar-benar sesuai dengan fakta persidangan," kata Roy.

Meski memenangkan praperadilan pertama, Roy memastikan proses hukumnya belum selesai. Ia mengatakan akan kembali menghadapi sidang praperadilan kedua yang dijadwalkan pada Jumat (10/7), sekaligus mengikuti proses perkara pokok di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. "Hari Jumat itu akan ada praperadilan yang kedua. Hari ini kita menyelesaikan praperadilan di Jakarta Selatan, kita juga akan mengikuti nanti perkara pokok itu di Jakarta Timur," ujarnya.

Praperadilan kedua yang diajukan Roy Suryo mempersoalkan keabsahan penetapan status tersangka. Dalam permohonan tersebut, tim kuasa hukum mempertanyakan penerapan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dinilai tidak sesuai dengan konstruksi perkara yang disangkakan kepada Roy. Sementara dalam praperadilan pertama, Roy menggugat keabsahan penggeledahan, penangkapan, penahanan, serta kepastian hukum terkait status pencelakaan melalui imigrasi.(tin,ist,tmo/dya)